

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bagir Manan. 2012. *Membedah UUD 1945*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Bagir Manan. 1992. *dasar-Dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hil, Co. Jakarta.
- Bambang Antariksa. 2016. *Qanun Bendera dan Lambang Aceh di Persimpangan Jalan, Validitas Produk Hukum daerah Dalam Perspektif Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Sofmedia. Medan.
- Benekditus Hestu Cipto Handoyono. 2021. *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancang peraturan perundang-undangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Eka Nam Sihombing, Ali Marwan SHB. 2017. *Ilmu perundang-undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Erni Setyowati, dkk. 2011., *Draftology peraturan adalah kabar gembira*, Indonesia Jentera School (IJSL). Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 15.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian hukum, pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra buana media. Yogyakarta.
- J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi tentang hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang hukum*, Konstitusi Press. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Lutfil Ansori. 2019. *Legal Drafting: teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan*. Rajagrafindo persada. Depok.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmi perundang-undangan: jenis, fungsi, dan materi muatan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2010. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2005. *negara hukum, demokrasi, dan judicial review*. UII press. Yogyakarta.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *Ilmu dan teknik pembentukan peraturan perUndang-Undangan*. Cv.Social Politic Genius(SIGn). Makassar.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Romi Librayanto. 2013. *Ilmu Negara (suatu pengantar)*. Arus Timur. Makassar.
- Sahya Anggara. 2018. *hukum administrasi negara*. Cv. pustaka setia. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu hukum*. Alumni. Bandung.
- Sobirin Malian dan Muhammad Uhaib As'ad. 2021. *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- Sutjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu hukum*. Alumni. Bandung

Makalah dan Karya Tulis Ilmiah

- Arie Elcaputera, Ahmad Wali, Ari Wiryadinata. *Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal ilmu hukum fakultas hukum Universitas Riau Vol. 11 No. 1, Februari 2022.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar memahami Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jurnal legislasi Indonesia Vol. 1 No. 2 September 2004. Diakses pada tanggal 26 Februari 2023.
- Abdurrakhman Alhakim, Egia Ginting. *Analisis pembentukan peraturan Undang-Undang cipta kerja pada tahapan perencanaan dan*

penyusunan berdasarkan Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Combines Volume 1 No 1 Februari 2021. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Bagir Manan dalam Ahmad Zaini. *Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. Al qisthas: Jurnal hukum dan politik* Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2020. Diakses pada 24 Februari 2023.

Bambang Antariksa. *Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia. Deliberatif* Vol. 1 No. 1 Juni 2017. Diakses pada tanggal 26 Februari 2023.

Fauzi Iswahyudi, *et al. Implementasi pengharmonisasian rancangan peraturan daerah berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2018. Buletin Konstitusi* Vol 3 no 1 Maret 2022. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Hermi Sari Bn. *Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dinamika Sosial Budaya* Vol. 22 Nomor 2 Desember 2020.

Rokilah dan Sulasno. *Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 Nomor. 2 Desember 2021.

Jimly Asshidiqqie. 2011. *Gagasan negara hukum. Makalah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Nanik Prasetyoningsih. *Substansi gagasan dalam beberapa konsep negara hukum. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 No. 2 Desember 2020, Serang-Banten. Diakses 24 februari 2023.

Tesis

Asrul Ibrahim. 2013. *“Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia: konstelasi dan kontroversi dalam monograf dekonstruksi perundang-undangan Indonesia”*. Tesis. Program Magister Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Semi Tangke. 2012. *Pengharmonisasian peraturan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah oleh kantor wilayah kementerian hukum dan Hak asasi manusia maluku. Tesis*. Program pasca sarjana. Program studi perencanaan pengembangan wilayah Universitas Hasanuddin. Makassar.

Suhartono. 2011. *"Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara"*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Berita Daring

Muhammad Sholeh. 2016. Berbagai efek pembatalan Perda bermasalah bagi daerah. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/berbagai-efek-pembatalan-perda-bermasalah-bagi-daerah.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.